**BAB I**

**PENDAHULUAN**

1. **Latar Belakang Penelitian**

Fenomena Globalisasi Ekonomi ditandai dengan semakin menipisnya batas-batas geografi dari kegiatan ekonomi atau pasar secara nasional atau regional, tetapi semakin mengglobal menjadi “satu” proses yang melibatkan banyak negara. Globalisasi ekonomi biasanya dikaitkan dengan proses internasionalisasi produksi,perdagangan dan pasar uang. Globalisasi ekonomi merupakan suatu proses yang berada diluar pengaruh atau jangkauan kontrol pemerintah, karena proses tersebut terutama digerakkan oleh kekuatan pasar global, bukan oleh kebijakan atau peraturan yang dikeluarkan oleh sebuah pemerintah secara individu[[1]](#footnote-1). Globalisasi Ekonomi tidak terlepas dari fenomena liberalisasi ekonomi, yang merupakan kritik terhadap kontrol politik dan pengaturan permasalahan ekonomi yang yang menyeluruh yang mendominasi pembentukan negara Eropa di abad keenambelas dan ketujuhbelas, yakni merkantilisme. Liberalisasi ekonomi merupakan sebuah paham atau sistem ekonomi yang menempatkan peran swasta sebagai tokoh utama dari pelaku ekonomi. Dalam ekonomi liberal, peran pemerintah tidak diperkenankan turut campur. Semuanya diatur oleh swasta ataupun individu pemilik modal. Dengan demikian, dalam sistem ini masyarakat diharapkan mampu berkompetisi untuk menjadi yang lebih baik. Kaum ekonomi liberal berpendapat bahwa perekonomian pasar merupakan suatu wilayah otonom dari masyarakat yang berjalan menurut hukum ekonominya sendiri. Pertukaran ekonomi bersifat positive sum game, dan pasar cenderung akan memaksimasi keuntungan bagi semua individu, rumah tangga dan perusahaan yang berpartisipasi dalam pertukaran pasar. Perekonomian merupakan wilayah kerjasama bagi keuntungan timbal balik antar negara dan juga antar individu. Dengan demikian, perekonomian internasional seharusnya didasarkan pada perdagangan bebas. Ekonomi liberal pada umumnya dianut oleh negara-negara maju dan modern. Ekonomi liberal ini menciptakan pemahaman akan terwujudnya kebebasan ekonomi yang tidak diatur oleh negara. Yang diharapkan muncul adalah suatu kondisi dimana masyarakat sipil bebas melakukan kegiatan ekonomi tanpa ada campur tangan politik atau pemerintah. Ekonomi pasar bebas merupakan salah satu bentuk yang paling diimpikan oleh ekonomi liberal. Dimana pasar bebas adalah arena terbuka tempat para individu bersama-sama menukarkan barang dan jasa. Dan untuk menuju pasar bebas, globalisasi merupakan satu pintu utama untuk memasuki area itu. Sitem global ini menciptakan perluasan hubungan-hubungan sosial dalam dan melalui dimensi-dimensi kegiatan baru antar lain kegiatan tekhnologi, organisasi, administrasi dan hukum.

Layaknya isu dalam hubungan internasional lainnya, Globalisasi ekonomi dan liberalisasi ekonomi pun tidak bisa terlepas dengan interaksinya dengan isu lain. Sebuah fenomena pasti memiliki kesinambungan dengan fenomena lain, baik dalam konteks sebab akibat ataupun konteks yang berbentuk lain. Dalam kasus ini Globalisasi eknomi dan liberalisasi ekonomi tidak terlepas dari konsep regionalism. Argumen itu pun didukung pula oleh paparan Umar Suryadi Bakry dalam bukunya Ekonomi Politik Internasional; Suatu Pengantar, dimana dijelaskan bahwa Globalisasi Ekonomi akan mendorong terbentuknya blok blok Ekonomi. Dimana blok Ekonomi merupakan bagian dari fenomena regionalism. Regionalisme dalam pandangan Louise Fawcett merupakan sebuah konstruksi kebijakan negara dan aktor non-negara melalui kerjasama dan koordinasi strategi dalam suatu kawasan. Tujuan dari regionalisme adalah untuk memperoleh dan mempromosikan tujuan bersama dalam satu ataupun sejumlah isu lainnya[[2]](#footnote-2). Salah satu blok Ekonomi yang menarik untuk dibahas adalah *Asean Economic Community* (AEC) yang juga dikenal sebagai *Masyarakat Ekonomi Asean*. Kerangka masyarakat Ekonomi Asean sendiri dibuat bersamaan dengan dua pilar Asean Community lainnya, yaitu; Asean Political Security Community dan Asean Socio-Cultural Community. Layaknya kerjasama internasional lainnya, fase fase kerja sama internasional Asean dibidang ekonomi dibentuk dari tahap awal yaitu *Preferential Trading Agreement*. *Preferential Trading Agreement* (PTA) ini berfungsi untuk mengurangi besar hambatan baik dalam bentuk tariff dan non tariff atau secara umum dikenal sebagai instrument liberalisasi perdagangan. Menurut Peter Lindert dan Peter Robson PTA merupakan tahap awal dari terbentuknya integrasi ekonomi[[3]](#footnote-3). Terkait dengan hal diatas, Negara Negara anggota dari Asean menyetujui Asean Preferential Agreement di Manila pada 24 Febuari 1977. Pasca kesepakatan dalam bidang PTA. Asean membentuk kembali kerangka kerjasama dalam bentuk *Free Trade Area (*FTA) yang mulai diberlakukan di tahun 1992. Keberadaan AFTA menjadi pintu yang membuka jalannya liberalisasi perdagangan dengan negara negara lain yang lebih dikenal dengan Asean-Mitra Wicara. Free Trade Area merupakan tahapan integrasi ekonomi diatas PTA, dimana karakter yang menjadi ciri dari tahapan ini adalah ditiadakannya semua jenis hambatan[[4]](#footnote-4). Pasca diberlakukannya AFTA dari tahun 2003, terjadi perkembangan liberalisasi perdagangan dikawasan ASEAN yang semakin berkembang. Hal tersebut mendorong terbangunnya Masyarakat Ekonomi Asean bersama dua pilar lainnya, yaitu Masyarakat Keamanan ASEAN dan Masyarakat Sosial Budaya ASEAN melalui Bali Concord II di Bali pada bulan Oktober 2003[[5]](#footnote-5). Ketiga pilar tersebut diharapkan dapat diimplementasikan pada tahun 2020, tetapi pada KTT ASEAN Ke-12 terjadi perubahan keputusan tentang kapan Masyarakat Ekonomi Asean akan diimplementasikan bersama dua pilar lainnya. Para pemimpin ASEAN menegaskan komitmen yang kuatuntuk mempercepat pembentukan Komunitas ASEAN pada tahun 2015 sejalan denganVisi ASEAN 2020 dan BALI CONCORD II, dan menandatangani Cebu Declaration onAcceleration of the Establishment of an ASEAN Community by 2015. Secara khusus para pemimpin sepakat untuk mempercepat pemebentukan Masyarakat Ekonomi ASEAN pada tahun 2015 dan mentranformasikan kawasan ASEAN menjadisuatu kawasan dimana terdapat aliran bebas barang, jasa, investasi, dan tenaga kerjaterampil, serta aliran modal yang lebih bebas[[6]](#footnote-6). Integrasi ekonomi regional atau kawasan sendiri memiliki tujuan utama untuk meningkatkan perdagangan dan kerjasama dalam bidang ekonomi, seperti industri dan investansi antar negara anggota, yang pada akhirnya meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan diwilayah tersebut[[7]](#footnote-7). Dapat dilihat dari tujuan utama terbentuknya integrasi ekonomi regional menitikberatkan pada pada pertumbuhan ekonomi yang diharapkan memberikan dampak positif bagi negara anggota yang terlibat. Pertumbuhan ekonomi dapat didefinisikan sebagai penjelasan mengenai faktor-faktor apa saja yang menentukan kenaikan output perkapita dalam jangka panjang, dan penjelasan mengenai bagaimana faktor-faktor tersebut sehingga terjadi proses pertumbuhan (Boediono: 1999). Salah satu pengukur akan kemajuan ekonomi sebuah negara adalah PDB. Dalam kegiatan perekonomian yang sebenarnya, pertumbuhan ekonomi menunjukan peningkatan secara spesifik terhadap pdoduksi barang dan jasa yang berlaku di suatu negara. Peningkatan ini dapat dilihat dari bertambahnya produksi barang industri, berkembangnya infrastuktur dan bertambahnya investasi di negara tersebut. Setiap negara akan selalu berusaha untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang optimal untuk membawa bangsanya kepada kehidupan yang lebih baik. Indonesia merupakan anggota sekaligus inisiator Asean. Indonesia sendiri merupakan Negara dengan kapasitas ekonomi yang cukup besar. Hal tersebut didukung pula dengan jumlah populasi yang besar sehingga mendorong banyaknya aktivitas ekonomi yang berlangsung di Negara ini. Indonesia memiliki dinamikanya tersendiri dalam bidang ekonomi. Krisis 1998 membuat ekonomi Indonesia terpuruk dalam beberapa waktu, sebelum akhirnya kembali menapaki tangga tangga perbaikan ekonomi. Bentuk perbaikan ekonomi yang dilakukan pemerintah berupa  memperbaiki dan membangun berbagai macam infrastruktur baru, membenahi berbagai macam aset Negara, peningkatan tenaga kerja yang berkualitas, ketersediaan bahan pangan dan devisa negara[[8]](#footnote-8). Menurut *Survei The Organisation for Economic Co-operation and Development* (OECD), Indonesia telah menikmati pertumbuhan yang kuat dan stabil selama satu setengah dasawarsa sejak terjadinya Krisis Asia[[9]](#footnote-9). Namun, melambat selama beberapa tahun terakhir, di mana hal tersebut dicerminkan dengan melemahnya permintaan internasional, jatuhnya harga komoditas serta pertumbuhan investasi yang rendah, yang sebagian besar diakibatkan oleh meningkatnya ketidakpastian peraturan/birokrasi dan hambatan infrastruktur[[10]](#footnote-10) Melihat perkembangan ekonomi memang harus melalui beberapa sektor, karena dalam kasus Indonesia sendiri terjadi kemunduran dalam beberapa sektor, tetapi juga meraih kemajuan angka pertumbuhan di sektor lainnya. Jika dipetakan dalam lingkup global, perekonomian Indonesia sendiri merupakan Negara dengan peringkat ke 8 terkait dengan pertumbuhan ekonominya, mendahului Inggris dan Prancis yang berdampingan di posisi 9 dan 10[[11]](#footnote-11). Posisi Indonesia pun terbilang cukup baik dalam struktur Asean, dimana Negara ini berada dalam posisi ke empat di kawasan tersebut berdasarkan peringkat *Global Competitiveness Report[[12]](#footnote-12)*. Indonesia yang meraih peringkat 37 dari 140 negara berada di bawah tiga Negara Asean, yaitu Singapura yang menduduki peringkat 2, Malaysia-peringkat 18 dan Thailand-peringkat 32[[13]](#footnote-13). Peringkat 37 di dunia dan ke-4 di lingkup Asean, merupakan kemajuan jika dilihat dari pencapaian tahun sebelumnya yang hanya berada di posisi 54. Meskipun begitu, Pemerintah masih perlu untuk memperbaiki sektor-sektor yang menopang pertumbuhan ekonomi Indonesia, agar dapat mencapai kesejahteraan rakyat yang merata. Bagi Indonesia, keberadaan MEA menjadi babak awal untuk mengembangkan berbagai kualitas perekonomian di kawasan Asia Tenggara dalam perkembangan pasar bebas di akhir 2016. MEA menjadi dua sisi mata uang bagi Indonesia : satu sisi menjadi kesempatan yang baik untuk menunjukkan kualitas dan kuantitas produk dan sumber daya manusia (SDM) Indonesia kepada negara-negara lain dengan terbuka, tetapi pada sisi yang lain dapat menjadi boomerang untuk Indonesia apabila Indonesia tidak dapat memanfaatkannya dengan baik. MEA akan menjadi kesempatan yang baik karena hambatan perdagangan akan cenderung berkurang bahkan menjadi tidak ada. Hal tersebut akan berdampak pada peningkatan eskpor yang pada akhirnya akan meningkatkan PDB Indonesia. Pada sisi investasi, kondisi ini dapat menciptakan iklim yang mendukung masuknya Foreign Direct Investment (FDI) yang dapat menstimulus pertumbuhan ekonomi melalui perkembangan teknologi, penciptaan lapangan kerja, pengembangan sumber daya manusia dan akses yang lebih mudah kepada pasar dunia yang pada akhirnya dapat berpengaruh pada perkembangan Ekonomi Indonesia kedepannya, agar menjadi lebih baik lagi. Berdasarkan paparan diatas, penulis merasa perlu untuk melihat hubungan antara MEA dengan perkembangan ekonomi Indonesia. Dengan demikian penulis tertarik terhadap hal diatas, maka judul penelitian ini adalah **“*Pengaruh Pemberlakuan MEA 2015 terhadap Pertumbuhan Ekonomi ASEAN : Analisis terhadap Pertumbuhan Ekonomi Indonesia*”**

1. **Identifikasi Masalah**

Berdasarkan uraian Latar Belakang diatas, diidentifikasi masalah sebagai berikut :

1. Apa tantangan dan tujuan Indonesia dalam memaksimalkan MEA sebagai alat untuk mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia ?
2. Bagaimana langkah-langkah Indonesia dalam pelaksanaan MEA ?
3. Upaya apa yang dilakukan Indonesia dalam pemberlakuan MEA untuk memaksimalkan pertumbuhan ekonomi Indonesia ?
   1. **Pembatasan Masalah**

Agar penelitian ini dapat dilakukan lebih fokus, mendalam dan tidak meluas dari pembahasan yang dimaksud, maka penulis memandang permasalahan penelitian yang diangkat perlu dibatasi ruang lingkupnya. Oleh sebab itu, penulis membatasi dengan lebih fokus kepada **“faktor perdagangan internasional dan investasi dalam meningkatkan PDB sebagai indikator pertumbuhan ekonomi dan pengaruhnya pada pemberlakuan MEA ”.**

**2.2 Perumusan Masalah**

Berdasarkan identifikasi masalah diatas, penulis merumuskan masalah, sebagai berikut : **“Bagaimana upaya-upaya yang dilakukan Indonesia dalam pemberlakuan MEA untuk memaksimalkan pertumbuhan ekonomi Indonesia”**

1. **Tujuan dan Kegunaan Penelitian.**
   1. **Tujuan Penelitian**
2. Untuk mengetahui tujuan dan manfaat dari Masyarakat Ekonomi Asean.
3. Untuk mengetahui dinamika perkembangan ekonomi di Indonesia sebelum terintegrasi dalam kerangka Masyarakat Ekonomi Asean.
4. Untuk mengetahui perbedaan pencapaian pasca terintegrasi dengan Masyarakat Ekonomi Asean.
5. Untuk mengetahui pengaurh pemberlakuan Masyarakat Ekonomi Asean terhadap perkembangan perekonomian Indonesia.

**3.2 Kegunaan Penelitian**

* 1. Menambah wawasan dan memperdalam pengetahuan peneliti secara teoritis dan praktis mengenai ASEAN dan MEA.
  2. Dapat memberikan gambaran kepada masyarakat luas mengenai ASEAN dan pelaksanaan MEA.
  3. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pihak-pihak yang menaruh perhatian kepada ASEAN dan MEA khususnya.
  4. Memenuhi salah satu syarat dalam menempuh ujian Sarjana Strata Satu (S1) pada Jurusan Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Pasundan.

1. **Kerangka Teori dan Hipotesis Penelitian**
   1. **Kerangka Pemikiran**

Dalam menulis karya ilmiah ini diperlukan landasan konseptual untuk mempermudah melakukan penelitian, landasan konseptual ini juga dimaksudkan untuk memperkuat analisa. Landasan ini akan disajikan oleh team penulis dalam kerangka berpikir yang bertujuan untuk membantu memahami dan menganalisa permasalahan dengan ditopang oleh pendapat-pendapat para pakar ilmu hubungan Internasional dan ilmu lain yang memiliki korelasi dengan objek kajian.

Proses integrasi kawasan khususnya dibidang Ekonomi tidak terlepas dari dua fenomena. Fenomena tersebut adalah Globalisasi Ekonomi dan Regionalisme. Globalisasi Ekonomi sendiri berangkat dari konsep Globalisasi.

Globalisasi menurut Sztompka dapat diartikan;

***sebagai proses yang menghasilkan dunia tunggal. Artinya, masyarakat di seluruh dunia menjadi saling tergantung pada semua aspek kehidupan baik secara budaya, ekonomi, maupun politik, sehingga cakupan saling ketergantungan benar-benar mengglobal.[[14]](#footnote-14)***

Sedangkan, Globalisasi Ekonomi sendiri memiliki makna sebagai berikut:

***Globalisasi ekonomi merupakan suatu proses yang berada diluar pengaruh atau jangkauan kontrol pemerintah, karena proses tersebut terutama digerakkan oleh kekuatan pasar global, bukan oleh kebijakan atau peraturan yang dikeluarkan oleh sebuah pemerintah secara individu.[[15]](#footnote-15)***

Dalam melihat Globalisasi ataupun Globalisasi Ekonomi, Tiga teori dari Ekonomi Politik Internasional melihat fenomena tersebut dengan sudut pandang yang berbeda. John Baylis dan Steve Smith dalam bukunya “The Globalization of World Politics: An Introduction to International Relations” perbedaan cara pandang tiga teori tersebut adalah, sebagai berikut[[16]](#footnote-16);

1. Menurut kaum realis, globalisasi tidak memiliki pengaruh yang signifikan dalam dunia politik, globalisasi membawa pembagian wilayah dunia menjadi nation – states. sedangkan, adanya keterkaitan antara ekonomi dan masyarakat membuat mereka lebih tergantung satu sama lain. Globalisasi mungkin dapat mempengaruhi hidup sosial, ekonomi dan budaya masyarakat dunia, tetapi pengaruh tersebut tidak melebihi sistem politik internasional.
2. Kaum liberal cenderung melihat globalisasi sebagai produk akhir dari transformasi dunia politik yang telah berjalan lama. Bagi kaum liberal, globalisasi secara fundamental telah mengacaukan politik dunia kaum realis karena globalisasi menunjukkan bahwa negara tidak lagi sebagai aktor sentral seperti dulu. Liberal sangat tertarik dalam revolusi dalam teknologi dan komunikasi yang diwakili oleh globalisasi. Globalisasi meningkatkan keterkaitan ekonomi dan teknologi antara hasil yang dipimpin masyarakat dalam pola yang sangat berbeda dari hubungan politik dunia dari apa yang telah terjadi sebelumnya. Negara tidak lagi sebagai unit tertutup dan sebagai hasilnya, dunia lebih terlihat seperti hubungan sarang laba-laba (cobweb) daripada seperti model hubungan yang dipaparkan negara Realisme atau model kelas teori Marxisme.
3. Marxisme menilai bahwa Globalisasi hanyalah sebuah sandiwara belaka, tidak ada sesuatu yang baru dalam globalisasi, dan globalisasi hanyalah sebuah fase baru dari perkembangan kapitalisme dunia. Pada akhirnya, globalisasi hanyalah sebuah fenomena yang dipimpin oleh negara – negara Barat yang pada dasarnya merupakan perkembangan lebih jauh tentang kapitalisme dunia. Bukannya membuat dunia lebih setara, globalisasi memperluas kesenjangan yang ada antara kelas – kelas utama, menengah kebawah, dan masyarakat miskin.

Liberalisasi ekonomi muncul sebagai kritik terhadap kontrol politik dan pengaturan permasalahan ekonomi yang menyeluruh yang mendominasi pembentukan negara Eropa di abad keenambelas dan ketujuhbelas, yakni merkantilisme. Kaum ekonomi liberal menolak teori dan kebijakan yang men-subordinat ekonomi pada politik. Adam Smith (1723-90), Bapak liberalisasi ekonomi, yakni bahwa pasar cenderung meluas secara spontan demi kepuasan kebutuhan manusia – menegaskan bahwa pemerintah tidak boleh ikut campur.

Pemikiran dasar ini mencakup aktor individu yang rasional, percaya terhadap kemajuan dan asumsi keuntungan timbal balik. Tetapi Smith juga menambah beberapa elemennya sendiri pada pemikiran liberal, mencakup pemikiran penting bahwa ekonomi pasar adalah sumber utama kemajuan, kerjasama, dan kesejahteraan. Campur tangan politik dan peraturan negara, sebaliknya, tidak ekonomis, kemunduran, dan dapat menyebabkan konflik (lihat juga Gilpin 1987: 30).

Ekonomi liberal disebut “doktrin dan serangkaian prinsip dalam mengorganisasi dan mengatur pertumbuhan ekonomi, dan kesejahteraan individu” (Gilpin 1987: 27). Ekonomi liberal didasarkan pada pemikiran bahwa jika dibiarkan sendiri perekonomian pasar akan berjalan secara spontan menurut mekanisme atau “hukum”-nya sendiri. Hukum ini dipandang melekat dalam proses produksi ekonomi dan perdagangan. Salah satu contoh adalah: “hukum keunggulan komparatif” yang dikembangkan oleh David Ricardo (1772-1823). Ricardo berpendapat bahwa perdagangan bebas – yaitu aktivitas komersial yang dijalankan secara bebas dari perbatasan nasional – akan membawa keuntungan bagi semua partisipan sebab perdagangan bebas menjadikan terjadinya spesialisasi dan spesialisasi meningkatkan efisiensi dan, dengan demikian, meningkatkan produktivitas. Paul Samuelson meringkas argumen sebagai berikut: “Apakah salah satu dari dua kawasan akan lebih efisien dalam produksi setiap barang dibanding yang lain atau tidak, jika masing-masing memiliki keunggulan komparatif (efisiensi relatih terbesar), perdagangan akan menjadi saling menguntungkan bagi kedua kawasan” (Samuelson 1967: 651). Dengan demikian, dalam perekonomian dunia yang berdasarkan perdagangan bebas semua negara akan mendapat keuntungan melalui spesialisasi, dan kesejahteraan global akan meningkat.

Kaum ekonomi liberal kemudian menolak pandangan kaum merkantilis bahwa negara adalah aktor dan fokus sentral ketika menghadapi permasalahan ekonomi. Aktor sentral adalah individual sebagai konsumen dan sebagai produsen. Pasar adalah arena terbuka tempat para individu bersama-sama menukarkan barang dan jasa. Individu bersifat rasional, dan ketika mereka memakai rasionalitas tersebut di pasar, semua partisipan untung. Pertukaran ekonomi di pasar kemudian bersifat *“positive sum game”*: setiap orang mendapatkan keuntungan lebih dari yang mereka tanamkan. Para individu dan perusahaan tidak akan aktif di pasar kecuali pasar tersebut menguntungkan mereka. Jalan menuju kesejahteraan manuia, kemudian, melalui perluasan yang bebas atas perekonomian pasar bebas, kapitalisme, bukan hanya dalam masing-masing negara tetapi juga lintas batas internasional. Kaum Liberal selanjutnya menolak pandangan *“zero sum”* kaum merkantilis, suatu pandangan bahwa keuntungan ekonomi suatu negara sebenarnya merupakan kerugian ekonomi negara lain.

Terdapat perdebatan terus menerus di antara para ekonomi liberal tentang seberapa luas campur tangan politik oleh pemerintahan mungkin diperlukan. Kaum ekonomi liberal terdahulu menyebutnya *laissez-faire*, yaitu kebebasan pasar dari semua jenis pembatasan dan peraturan politik. Bahkan, meskipun kaum ekonomi liberal terdahulu menyadari perlunya kerangka kerja hukum yang dibangun secara politis sebagai dasar bagi pasar: *laissez-faire* bukan berarti ketiadaan peraturan politik apa pun; *laissez-faire* berarti bahwa negara hanya akan menyiapkan fondasi minimalnya yang dibutuhkan bagi pasar agar berfungsi secara tepat. Versi ekonomi liberalisme ini, berupaya meminimasi campur tangan negara, yang dapat disebut “ekonomi liberal klasik”. Pada saait ini pandangan ini juga ditempatkan dalam label seperti “konservatisme” atau “neoliberalisme”, meskipun demikian, isinya pada dasarnya sama. Kebijakan ekonomi “konservatif/neoliberal” Margareth Thatcher di Inggris dan Ronald Reagen di Amerika serikat keduanya didasarkan pada doktrin *laissez-faire*.

Kaum ekonomi liberal telah menyadari sejak awal bahwa dalam beberapa hal pasar mungkin saja tidak berjalan menurut harapan atas efisiensi dan keuntungan bersama; kasus sepeti ini biasanya disebut contoh dari “kegagalan pasar. Peraturan politik mungkin diperlukan untuk memperbaiki atau mencegah kegagalan pasar. Sebagian kaum ekonomi liberal selanjutnya berpendapat mendukung ruang lingkup yang lebih besar atas campur tangan negara dalam pasr. John Stuart Mill dalam banyak hal adalah seseorang ekonomi liberal *laissez-faire*, tetapi ia juga kritis terhadap perbedaan yang tajam atas pendapatan, kekayaan, dan kekuasaan, yang ia amati di Inggris pada abad kesembilanbelas. Hal itu membuat nya menyerukan tindakan negara yang terbatas dalam beberapa bidang, termasuk pendidikan dan bantuan bagi orang miskin. Di 1930 John Maynard Keynes, eknom terkemuka awal abad keduapuluh, beranjak satu langkah lebih jauh. Menurut Keynes, perekonomian pasar merupakan keuntungan besar bagi manusia, tetapi juga diikuti dengan keburukan potensial atas “bahaya, ketidakpastian dan kebodohan”. Situasi itu dapat diperbaiki melalui manajemen politik yang lebih baik terhadap pasar tersebut. Keynes kemudian berpendapat yang mendukung pasar yang “dengan bijaksana diatur” oleh negara (Keynes 1963: 321).

Pandangan yang lebih positif atas negara ini memuncak pada perubahan besar dalam doktrin ekonomi liberal. Pemikiran Keynesian membuka jalan bagi pemikiran liberal yang lebih maju yang tetap berdasarkan pada perekonomian pasar. Pandangan Keynesian tersebut populer di Eropa dalam dekade setelah Perang Dunia Kedua. Di 1980, bagaimanapun juga, pendulum berbalik lagi ke liberalisme *laissez-faire*. Salah satu alasan utama bagi kepercayaan liberal yang diperbaharui dalam pasar bebas ini adalah keyakinan bahwa globalisasi ekonomi akan membawa kesejahteraan bagi semua.

Ringkasannya, kaum ekonomi liberal berpendapat bahwa perekonomian pasar merupakan suatu wilayah otonom dari masyarakat yang berjalan menurut hukum ekonominya sendiri. Pertukaran ekonomi bersifat ‘positive sum game’, dan pasra cenderung akan memaksimalkan keuntungan bagi semua individu, rumah tangga, dan perusahaan yang berpartisipasi dalam pertukaran pasar. Perekonomian merupakan wilayah kerjasama bagi keuntungan timbal balik antar negara dan juga antar individu. Dengan demikian, perekonomian internasional seharusnya didasarkan pada perdagangan bebas. Para ekonom liberal klasik memandang peran negara seolah-olah meninggalkan pasar sendirian, termasuk pasar internasional dan juga pasar nasional: *laissez-faire*. Tetapi beberapa ekonom liberal abad keduapuluh mendukung keterlibatan negara yang mengikat dalam pasar.

Globalisasi Ekonomi dan Liberalisasi Ekonomi dianggap menjadi katalis dari terbentuknya blok blok Ekonomi seperti Masyarakat Ekonomi Eropa, NAFTA, AFTA dan APEC. Blok Blok Ekonomi ini kemudian lebih dikenal dalam istilah regionalism.

Pengertian Regionalisme sendiri menurut Louise Fawcett, adalah sebagai berikut:

***Regionalism merupakan sebuah konstruksi kebijakan negara dan aktor non -negara melalui kerjasama dan koordinasi strategi dalam suatu kawasan[[17]](#footnote-17)***

Regionalism tidak hanya kerjasama dalam bidang Ekonomi, namun juga dapat berbentuk aliansi militer. Namun keadaan konstelasi global yang menunjukkan pergeseran isu keamanan kearah kesejahteraan, sepertinya memberikan dampak yang mendasar bagi pengertian Regionalisme yang semakin menyempit menjadi kerjasama dibidang Ekonomi.

Layaknya Globalisasi, Fenomena Regionalisme pun menghasilkan pandangan yang berbeda beda dari tiga teori Ekonomi Politik Internasional. Regionalisme yang berakar dari konsep kerja sama mendorong perbedaan pendekatan pemahaman dari tiga teori tersebut.

Merkantilisme menilai fenomena fenomena yang mewarnai sub disiplin HI tersebut harus berpijak kepada peran Negara dimana Negara harus memiliki andil paling besar dalam mengatur isu isu ekonomi, seperti perdagangan internasional. Ekonomi dianggap sebagai alat politik yang fungsinya suatu dasar bagi kekuasaan politik[[18]](#footnote-18). Sehingga proses regionalisasi atau regionalism merupakan alat politik suatu Negara untuk memperkuat kapabilitas power suatu Negara. Neo-Liberalisme beranggapan lain, dimana teori ini menekankan bahwa bidang Ekonomi harus dibiarkan secara mandiri. Secara tegas kaum ekonomi liberal menolak teori dan kebijakan yang mensubordinat ekonomi pada politik[[19]](#footnote-19). Adam Smith meyakini bahwa pasar cenderung meluas secara spontan demi kepuasan kebutuhan manusia, serta menegaskan bahwa pemerintah tidak boleh ikut campur. Neo-Liberalisme menilai positif regionalism karena mendorong keterbukaan teknologi informasi sehingga mengintegrasi sektor social dan ekonomi yang mampu mengurangi peran politik (Negara) dalam kancah internasional. Teori ketiga yaitu Marxisme, cenderung membahas permasalahan dari sisi lain fenomena Ekonomi Politik Internasional. Jika dua teori sebelumnya, menekankan pada peran siapa yang lebih penting. Marxisme justru menekankan pada konteks social yang berdasarkan Wallerstein menghasilkan hirarki dari wilayah core, semi periphery dan peryphery[[20]](#footnote-20). Selain tiga perbedaan pandangan dari teori tersebut, Regionalisme tidak bisa dilepaskan dari teori fungsionalisme yang dapat dikatakan sangat menopang tumbuhnya kerja sama kawasan. Teori Fungsionalisme berakar pada Liberal Institusionalisme atau Neo-Liberal[[21]](#footnote-21). Teori Fungsionalisme ini kemudian dikoreksi dan melahirkan teori baru yang dikenal sebagai Teori Neo-fungsionalisme. Teori ini menekankan pada peran institusi dan bagaimana Negara memiliki andil besar dalam pembentukan dan kinerja sebuah institusi[[22]](#footnote-22). Pada hakikatnya terbentuknya suatu proses Regionalisme tidak terlepas misi utama didirikannya bentuk kerjasama ini. Misi utama dalam regionalism adalah tercapainya sebuah proses yang dikenal dengan Integrasi. Integrasi sendiri menurut T. Balassa memiliki pengertian sebagai berikut:

***Integrasi merupakan bentuk penghapusan diskriminasi serta kebebasan bertransaksi (integrasi negative) dan sebagai bentuk penyerahan kebijakan kepada lembaga bersama (integrasi positif).[[23]](#footnote-23)*** Dari pengertian Integrasi tersebut dapat diketahui, bahwa integrasi bersifat umum tidak hanya meliputi bidang ekonomi, tetapi lebih luas dari itu. Namun, team penulis meyakini perlunya pengertian integrasi ekonomi dalam kerangka pemikiran, dikarenakan unit analisa yang hendak dikaji merupakan Masyarakat Ekonomi Asean yang tergolong sebagai integrasi ekonomi kawasan.

Integrasi Ekonomi sendiri memiliki pengertian sebagai berikut:

***Integrasi ekonomi adalah rancangan dan implementasi serangkaian kebijakan khusus antar kelompok negara dalam region yang bertujuan untuk meningkatkan pertukaran barang maupun faktor produksi antar negara anggota. Integrasi ekonomi yang terbentuk meliputi integrasi perdagangan dan integrasi moneter.[[24]](#footnote-24)***

Proses Integrasi Kawasan sendiri menurut Peter Lindert dan Peter Robson tergolong dalam 5 klasifikasi,yaitu:

1. ***PTA atau Preferentil Trading Agreement***
2. ***FTA atau Free Trade Area***
3. ***CU atau Custom Union***
4. ***CM atau Common Market***
5. ***EU atau Economic Union[[25]](#footnote-25)***

Namun menurut Umar Suryadi Bakry ada cara berbeda dalam mengklasifikasi bentuk integrasi ekonomi regional. Klasifikasi tersebut didasari berdasarkan jenisnya dan suatu fenomena integrasi bias terjadi tanpa jenis integrasi lainnya. Dalam kata lain klasifikasi integrasi ini lebih luwes daripada teori proses integrasi dari Peter Lindert dan Peter Robson. Klasifikasi jenis integrasi tersebut diantara lain,yaitu:

1. ***Pasar produk atau integrasi perdagangan***
2. ***Integrasi pasar tenaga kerja***
3. ***Integrasi pasar modal***
4. ***Integrasi moneter***
5. ***Integrasi kegiatan dan peraturan pemerintah[[26]](#footnote-26)***

Tujuan utama integrasi ekonomi adalah untuk meningkatkan perdagangan dan kerjasama dalam bidang ekonomi , seperti industri dan investasi antar Negara anggota yang pada akhirnya meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan di wilayah tersebut[[27]](#footnote-27). Jika dikaitkan dengan integrasi Ekonomi Kawasan di ASEAN atau yang berada dalam kerangka Masyarakat Ekonomi Asean. Integrasi ini memiliki empat tujuan utama adalah Menciptakan pasar tunggal dan basis produksi yang stabil, makmur, sangat kompetitif, dan terintegrasi secara ekonomis melalui fasilitasi yang efektif untuk perdagangan dan investasi, yang di dalamnya terdapat arus lalu lintasbarang, jasa-jasa dan investasi yang bebas; terfasilitasinya pergerakan pelaku usaha, pekerja profesional, pekerja berbakat dan buruh; dan arus modal yang lebih bebas.[[28]](#footnote-28) Pengertian Masyarakat Ekonomi ASEAN adalah sebagai berikut:

***ASEAN Economic Community (AEC) merupakan suatu program bagi negara-negara ASEAN untuk lebih meningkatkan kualitas ekonomi khususnya perdagangan agar menjadi sebuah akses yang lebih mudah seperti menerapkan penghapusan bea masuk (Free Trade Area) untuk mewujudkan sebuah pasar tunggal.[[29]](#footnote-29)***

Tujuan lain dari ASEAN Economic Community adalah untuk tercapainya kesejahteraan bagi masyarakat ASEAN secara keseluruhan. Kesejahteraan rakyat selalu memiliki keterkaitan dengan pertumbuhan ekonomi. Ada beberapa model teori pertumbuhan ekonomi yang berkembang hingga saat ini, yaitu : Teori Pertumbuhan Ekonomi Klasik, Teori Pertumbuhan Neo Klasik, Model Pertumbuhan Interegional, Teori Pertumbuhan Harrod-Domar dan Teori Pertumbuhan Kuznet.

Teori pertumbuhan ekonomi klasik merupakan salah satu dasar dari teori pertumbuhan yang dipakai baik dari dulu sampai sekarang. Teori pertumbuhan ekonomi klasik dikemukakan oleh tokoh-tokoh ekonomi seperti Adam Smith dan David Ricardo.

Menurut Smith (dalam Arsyad,1999) membedakan dua aspek utama dalam pertumbuhan ekonomi yaitu : Pertumbuhan output total dan pertumbuhan penduduk. Pada pertumbuhan output total sistem produksi suatu negara dibagi menjadi tiga, yaitu :

1. Sumber Daya Alam yang Tersedia

Apabila sumber daya alam belum dipergunakan secara maksimal maka jumlah penduduk dan stok modal merupakan pemegang peranan dalam pertumbuhan output. Sebaliknya pertumbuhan output akan terhenti apabila penggunaan sumber daya alam sudah maksimal.

2. Sumber Daya Insani

Jumlah penduduk akan menyesuaikan diri dengan kebutuhan akan angkatan kerja yang bekerja dari mayarakat. 26

3. Stok Barang Modal

Jumlah dan tingkat pertumbuhan output tergantung pada laju pertumbuhan stok modal.

Teori pertumbuhan neo klasik dikembangkan oleh dua orang ekonom yaitu : Robert Solow dan Trevor Swan. Teori neoklasik berpendapat bahwa pertumbuhan ekonomi bersumber pada penambahan dan perkembangan faktor-faktor yang mempengaruhi penawaran agregat. Teori pertumbuhan ini juga menekankan bahwa perkembangan faktor-faktor produksi dan kemajuan teknologi merupakan faktor penentu dalam pertumbuhan ekonomi (Sukirno,2005).

Teori neoklasik juga membagi tiga jenis input yang berpengaruh dalam pertumbuhan ekonomi, yaitu :

1. Pengaruh modal dalam pertumbuhan ekonomi

2. Pengaruh teknologi dalam pertumbuhan ekonomi

3. Pengaruh angkatan kerja yang bekerja dalam pertumbuhan ekonomi

Teori neoklasik memiliki pandangan dari sudut yang berbeda dari teori klasik yaitu dari segi penawaran. Pertumbuhan ekonomi ini bergantung kepada fungsi produksi.

Model pertumbuhan interregional menambahkan faktor-faktor yang bersifat eksogen yang berarti tidak terikat kepada kondisi internal perekonomian wilayah. Model ini hanya membahas satu daerah dan tidak memperhatikan dampak dari daerah lain, maka model ini disebut dengan model interregional. Teori ini sebenarnya merupakan perluasan dari teori basis ekspor sehingga diasumsikan selain ekspor, pengeluaran pemerintah dan investasi bersifat eksogen dan saling terkait dengan satu sitem dari daerah lain. Teori neoklasik berpendapat faktor teknologi ditentukan secara eksogen dari model. Kekurangan dalam keberadaan teknologi ini yang menyebabkan munculnya teori baru yaitu teori pertumbuhan endogen.

Teori Harrod-Domar merupakan penyempurnaan dari analisis Keynes yang dianggap kurang lengkap. Dalam teori ini Harrod-Domar menganalisis syarat-syarat yang diperlukan agar perekonomian bisa tumbuh dan berkembang dalam jangka panjang. Teori ini ingin menunjukan syarat yang dibutuhkan supaya perekonomian bisa tumbuh dan berkembang dengan baik (Arsyad,1999).

Harrod-Domar (dalam Sadono,2005), menyatakan supaya seluruh barang modal yang tersedia dapat digunakan sepenuhnya, permintaan agregat harus bertambah sebanyak kenaikan kapasitas barang modal yang terwujud sebagai akibat dari investasi masa lalu. Jadi untuk menjamin pertumbuhan ekonomi yang baik maka nila investasi dari tahun ketahun harus selalu naik. Dari teori Harrod-Domar dapat dijelaskan terdapat hubungan positif antara pendapatan nasional dengan rasio tabungan apabila terdapat kenaikan GDP maka rasio tabungan akan naik. Hal ini akan terjadi apabila tidak ada pengaruh dari pemerintah. Harrod-Domar menjelaskan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi sangat mudah, yaitu dengan menabung atau berinvestasi sebanyak mungkin dan laju pertumbuhan ekonomi akan meningkat.

Pertumbuhan ekonomi Kuznet menunjukan adanya kemampuan jangka panjang dari pertumbuhan ekonomi suatu negara untuk menyediakan barang- barang ekonomi kepada rakyatnya. Hal ini dapat dicapai apabila ada kemajuan dibidang teknologi, kelembagaan dan penyesuaian idiologi.

Teori pertumbuhan Kuznet dalam analisinya menambahkan enam karakteristik pertumbuhan ekonomi suatu negara, yaitu :

1. Tingginya tingkat pendapatan perkapita

2. Tingginya produktifitas tenaga kerja

3. Tingginya faktor transformasi struktur ekonomi

4. Tingginya faktor transformasi sosial idiologi

5. Kemampuan perekonomian untuk melakukan perluasan pasar

6. Adanya kesadaran, bahwa pertumbuhan ekonomi sifatnya terbatas

Pertumbuhan ekonomi menurut Professor Tulus Tambunan memiliki pengertian sebagai berikut:

***Pertumbuhan ekonomi adalah penambahan Produk Domestik Bruto (PDB) yang berarti penambahan Pendapatan Nasional (PN).[[30]](#footnote-30)***

PDB pada dasarnya merupakan jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam suatu negara tertentu, atau merupakan jumlah nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi. PDB atas dasar harga berlaku menggambarkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga yang berlaku pada setiap tahun, sedangkan PDB atas dasar harga konstan menunjukkan nilai tambah barang dan jasa tersebut yang dihitung menggunakan harga yang berlaku pada satu tahun tertentu sebagai dasar[[31]](#footnote-31).

Kenaikan jumlah PDB bisa disebabkan oleh beberapa aktivitas ekonomi, namu yang paling lumrah adalah sektor perdagangan. Perdagangan sendiri memiliki makna sebagai berikut:

***Perdagangan atau perniagaan dalam arti umum ialah pekerjaan membeli barang darisuatu tempat atau pada suatu waktu dan menjual barang itu di tempat lain atau pada waktu yang berikut dengan maksud memperoleh keuntungan. Di zaman yang modern ini perdagangan adalah pemberian perantaraan kepada produsen dan konsumen untuk membelikan.[[32]](#footnote-32)***

Sedangkan Perdagangan Internasional menurut Michael Czinkota memiliki makna sebagai berikut:

***Perdagangan internasional adalah sebuah aktivitas pertukaran barang, jasa, ataupun modal yang melintasi batas negara[[33]](#footnote-33)***

Indonesia sendiri merupakan Negara yang mengalami dinamika dalam perkembangan ekonominya. Menurut Survei The Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD), Indonesia telah menikmati pertumbuhan yang kuat dan stabil selama satu setengah dasawarsa sejak terjadinya Krisis Asia[[34]](#footnote-34). Namun, melambat selama beberapa tahun terakhir, di mana hal tersebut dicerminkan dengan melemahnya permintaan internasional, jatuhnya harga komoditas serta pertumbuhan investasi yang rendah, yang sebagian besar diakibatkan oleh meningkatnya ketidakpastian peraturan/birokrasi dan hambatan infrastruktur[[35]](#footnote-35)

Dilihat dari segi suatu Negara yang berdaulat posisi Ekonomi Indonesia bisa dibilang cukup baik. Hal tersebut dapat dilihat dari jumlah GDP Indonesia yang besar dan membuat Negara ini termasuk dalam forum eksklusif seperti G20. G-20 atau Kelompok 20 ekonomi utama adalah kelompok 19 negara dengan perekonomian besar di dunia ditambah dengan Uni Eropa. Dilansir dari jurnalasia.com yang mengutip pernyataann dari Gubernur Bank Indonesia (BI) Agus D.W. Martowardojo, bahwa Indonesia dihormati karena growth (per­tumbuhan) rata-rata 6%. Di antara 20 negara terbesar dunia (Indonesia) masuk peringkat tiga di bawah China dan India[[36]](#footnote-36).

Tidak hanya dalam lingkup dunia, Indonesia juga berada dalam posisi yang aman di lingkup ASEAN dari segi Global Competitiveness Report yang dilansir *World Economic Forum.* Indonesia berada di beringka 37 dari 140 negaradan berada di bawah tiga Negara Asean, yaitu Singapura yang menduduki peringkat 2, Malaysia-peringkat 18 dan Thailand-peringkat 32[[37]](#footnote-37).

Global Competitiveness Report oleh *World Economic Forum* di definisikan sebagai berikut;

***Kemampuan suatu Negara untuk mencapai PDB percapita yang terus menerus meninggi yang bearti suatu Negara harus menjaga mesin pertumbuhan ekonomi agar terus berkelanjutan sehingga angka total PDB dan PDB percapita tetap tinggi[[38]](#footnote-38).***

Posisi Indonesia menunjukkan bahwa perekonomian Indonesia memiliki andil kuat dalam kombinasi GDP kawasan. Meskipun begitu perkembangan Ekonomi Indonesia tidak naik terus menerus, terjadi beberapa penurunan dari beberapa sektor yang perlu dibenahi oleh pemerintah.

Berdasarkan konsep dan teori di atas, penulis menarik asumsi sebagai berikut :

1. Keberadaan MEA sebagai sebagai suatu kawasan yang kompetitif dapat menjadi pendorong bagi tumbuhnya perekonomian di kawasan Asia Tenggara yang nantinya akan memberikan efek terhadap pertumbuhan perekonomian Indonesia.
2. MEA sebagai momentum Indonesia, dengan adanya MEA diharapkan bisa membantu pertumbuhan ekonomi Indonesia dengan memanfaatkan potensi-potensi yang ada, diharapkan nantinya perekonomian Indonesia bisa bersaing, bukan saja hanya dengan negara di ASEAN tapi juga bisa bersaing dengan negara Asia lainnya seperti Cina, India, Korea Selatan dan Jepang, bahkan bisa bersaing dengan negara maju di Eropa atau Amerika Serikat.
   1. **Hipotesis Penelitian**

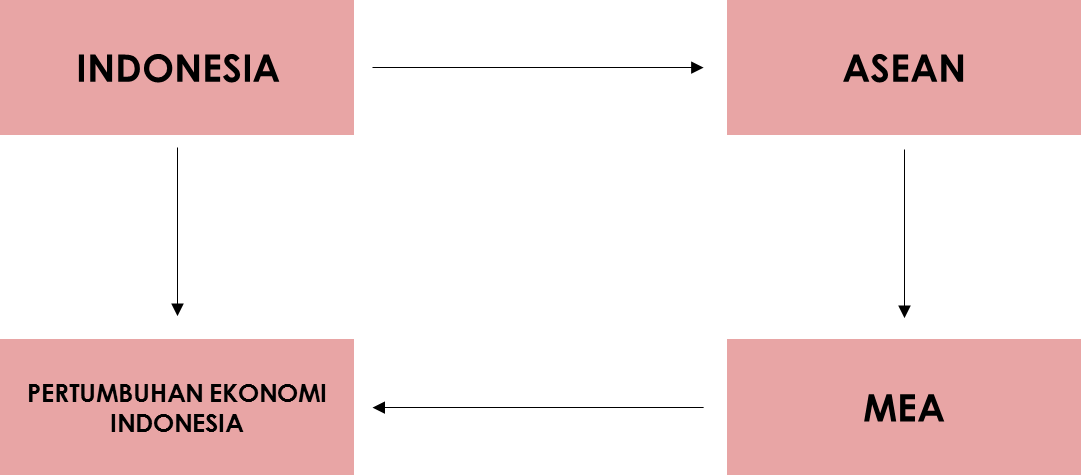
Berdasarkan kerangka teoritis dan perumusan masalah diatas, maka ditarik kesimpulan hipotesis sebagai berikut : **“Dengan diberlakukannya MEA, maka diharapkan MEA memiliki kemampuan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia,”**

* 1. **Operasional Variabel**

**Tabel 1**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Variabel dalam (Teoritis) | Indikator  (Empirik) | Verivikasi (Analisis) |
| Variabel Bebas :  Dengan diberlakukannya MEA | 1. Adanya Cetak Biru MEA.  2. Percepatan pembentukan Masyarakat ASEAN menjadi tahun 2015 | * Pada KTT ASEAN tahun 2003 di Bali, negara-negara ASEAN menyepakati pembentukan komunitas ASEAN yang salah satu pilarnya adalah MEA.   Pada pertemuan ke-38 Menteri ASEAN, di Kuala Lumpur, Malaysia, para Menteri Ekonomi ASEAN telah menginstruksikan Sekretariat ASEAN untuk menyusun ”Cetak Biru MEA”.  Pads KTT ke-12 ASEAN di Cebu bulan Januari 2007 telah disepakati ”Declaration on the Acceleration of the Establishment of an ASEAN Community by 2015”. |
| Variabel Terkait :  maka diharapkan MEA memiliki kemampuan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia. | 1. Peningkatan ekspor dan penambahan investasi | Ekonom Universitas Indonesia Berly Martawardaya mengatakan, Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) yang sudah diberlakukan sejak 31 Desember 2015, bisa membantu pertumbuhan ekonomi Indonesia apabila Indonesia bisa memanfaatkannya untuk meningkatkan ekspor dan menambah investasi.  Sumber : Suara Pembaruan |

* 1. **Skema Kerangka Teoritis**



1. **Metode Penelitian dan Teknik Pengumpulan Data.**
   1. **Metode Penelitian.**

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini, adalah sebagai berikut :

* + - 1. Metode Deskriptif Analisis yaitu metode penelitian yang menggambarkan kejadian-kejadian atau peristiwa-peristiwa berdasarkan data dan fakta yang ada dan sedang berlangsung, untuk menghasilkan analisis mengenai keberadaan MEA yang dapat mendorong tumbuhnya perekonomian di Indonesia yang nantinya akan memberikan efek terhadap peningkatan pertumbuhan ekonomi Indonesia.
      2. Metode Historis Analitis, yaitu metode yang digunakan dalam menelaah terhadap kejadian-kejadian, perkembangan dan pengalaman masa lalu serta merupakan interprestasi dari data yang tersedia, di mana metode historis ini bertujuan mengkonstruksi masa lalu secara sistematis dengan mengumpulkan dan mengklasifikasikan semua bukti untuk menetapkan fakta dan mencapai konklusi yang dapat dipertahankan sehubungan dengan adanya MEA yang merupakan realisasi pasar bebas di Asia Tenggara, yang bertujuan untuk menjadikan ASEAN sebagai suatu kawasan ekonomi yang kompetitif, serta mewujudkan integrasi ekonomi ASEAN, yakni tercapainya wilayah ASEAN yang aman dengan tingkat dinamika pembangunan yang lebih tinggi dan terintegrasi, pengentasan masyarakat ASEAN dari kemiskinan, serta pertumbuhan ekonomi untuk mencapai kemakmuran yang merata dan berkelanjutan.
  1. **Teknik Pengumpulan Data.**

Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Studi Kepustakaan, yaitu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mempelajari dan mengkaji permasalahan-permasalahan melalui buku-buku, dokumen-dokumen, peraturan-peraturan serta bahan bacaan lainnya sebagai pegangan serta berkaitan dengan sasaran penelitian.

1. **Lokasi Penelitian**

Dalam penelitian ini penulis memperoleh data dan informasi yang bersumber dari berbagai tempat diantaranya:

1. Perpustakaan FISIP UNPAS Jalan Lengkong Besar No. 68 Bandung.
2. Perpustakaan UNPAR Jalan Ciumbuleuit No. 94, Hegarmanah, Cidadap, Bandung.
3. Perpustakaan UNPAD kampus Dipati Ukur & Jatinangor
4. Perpustakaan Ali Alatas, Kementerian Luar Negeri Jl. Taman Pejambon No. 6.
5. Badan Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Jalan Kawaluyaan Indah

II No. 4 Bandung.

1. Kementerian Luar Negeri RI Jakarta, Direktorat Jenderal Kerjasama

Asean Jl. Taman Pejambon No. 6.

1. **Sistematis Penulisan**

Sistematika penulisan ini digunakan sebagai pola kerangka befikir yang diharapkan dapat memberikan gambaran bagaimana masalah-masalah dirangkai, dikumpulkan dan dipecahkan untuk menghasilkan suatu kesimpulan, skripsi ini dibagi menjadi lima bab, yaitu:

**BAB I** Dalam bab ini berisi ringkasan laporan tugas akhir, penulis menguraikan tentang latar belakang masalah, identifikasi masalah, pembatasan masalah, perumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, kerangka pemikiran dan hipotesis, metode penelitian dan teknik pengumpulan data, lokasi penelitian, jadwal dan kegiatan penelitian, dan diakhiri dengan sistematika penulisan.

**BAB II** Berisi uraian mengenai tinjauan umum mengenai MEA 2015**.** Bab ini berisi informasi atau uraian mengenai tema dan variabel bebas.

**BAB III** Berisi uraian tentang variabel terikat yaitu indikator pertumbuhan ekonomi suatu negara serta faktor-faktor yang mempengaruhinya. Bab ini berisi informasi atau uraian mengenai tema dalam variabel terkait.

**BAB IV** Bab ini berisi uraian atau jawaban terhadap hipotesis dan indikator-indikator penelitian baik indikator variabel bebas maupun indikatot variabel terikat.

**Bab V** Penutup yang berisi kesimpulan hasil penelitian.

Bab ini merupakan kesimpulan dari data fakta hasil penelitian.

1. Tulus Tambunan,Dokumen Pengusaha Kadin Brebes Di Dalam Era Globalisasi: Tantangan Dan Ancaman, hal 1 [↑](#footnote-ref-1)
2. Mellino yoga saputra, PENGARUH PERNYATAAN ATIUR RAHMAN *: “SAARC IS NOT YET A COMMUNITY”* TERHADAP EFEKTIVITAS SAARC (Analisis Hybrid-Regionalism), hal 3 dalam http://s3.amazonaws.com/academia.edu.documents/43957159/UAS.pdf?AWSAccessKeyId=AKIAJ56TQJRTWSMTNPEA&Expires=1476944723&Signature=PmpM5XdZuWfDOWsOxh4nLRnWW2M%3D&response-content-disposition=inline%3B%20filename%3DPENGARUH\_PERNYATAAN\_ATIUR\_RAHMAN\_SAARC\_I.pdf [↑](#footnote-ref-2)
3. Umar Suryadi Bakry, Ekonomi Politik Internasional: Suatu Pengantar, hal 213 [↑](#footnote-ref-3)
4. Ibid, [↑](#footnote-ref-4)
5. Masyarakat Ekonomi Asean cetak biru. Hal 6 dalam http://aeccenter.kemendag.go.id/media/176978/cetak-biru-komunitas-ekonomi-asean.pdf [↑](#footnote-ref-5)
6. Ibid [↑](#footnote-ref-6)
7. Umar Suryadi Bakry, Op.Cit., hal 213. [↑](#footnote-ref-7)
8. Redaksi, “ Melihat Perkembangan Ekonomi Indonesia di Mata Dunia” My Bussiness (Online) dalam <http://www.mybusiness.id/melihat-perkembangan-ekonomi-indonesia-di-mata-dunia/>, diakses 11 Juli 2017 [↑](#footnote-ref-8)
9. OECD, “Survei Ekonomi OECD INDONESIA” Dalam <https://www.oecd.org/economy/Overview-Indonesia-2015-Bahasa.pdf> , hal 2 diakses 13 Juli 2017 [↑](#footnote-ref-9)
10. Ibid. [↑](#footnote-ref-10)
11. Redaksi my business online, Op.Citt., [↑](#footnote-ref-11)
12. “Indeks Daya Saing Global Indonesia Duduki Peringkat 37 dari 140 Negara” dalam http://www.kemenkeu.go.id/Berita/indeks-daya-saing-global-indonesia-duduki-peringkat-37-dari-140-negara , diakses 13 Juli 2017 [↑](#footnote-ref-12)
13. Ibid. [↑](#footnote-ref-13)
14. Miftahuddin, Pendidikan, Globalisasi, Dan Akhlak, hal 3, dalam <http://staff.uny.ac.id/system/files/penelitian/Miftahuddin,%20M.Hum./Artikel%20Pendidikan,%20Globalisasi,%20dan%20Akhlak.pdf>, [↑](#footnote-ref-14)
15. Tulus Tambunan, Dokumen Pengusaha Kadin Brebes Di Dalam Era Globalisasi: Tantangan Dan Ancaman, hal 1 Dalam http://www.kadin-indonesia.or.id/enm/images/dokumen/KADIN-98-2498-06022008.pdf [↑](#footnote-ref-15)
16. Ufhaira Nadhifa “Globalisasi dalam Hubungan Internasional” dalam <http://ufaira-nadhifa-fisip13.web.unair.ac.id/artikel_detail-89571-Pengantar%20Ilmu%20Hubungan%20Internasional-Globalisasi%20dalam%20Hubungan%20Internasional.html>, diakses 15 Juli 2016 [↑](#footnote-ref-16)
17. Mellino yoga saputra, PENGARUH PERNYATAAN ATIUR RAHMAN *: “SAARC IS NOT YET A COMMUNITY”* TERHADAP EFEKTIVITAS SAARC (Analisis Hybrid-Regionalism), hal 3 dalam http://s3.amazonaws.com/academia.edu.documents/43957159/UAS.pdf?AWSAccessKeyId= AKIAJ56TQJRTWSMTNPEA&Expires=1476944723&Signature=PmpM5XdZuWfDOWsOxh4nLRnWW2M%3D&response-content-disposition=inline%3B%20filename%3DPENGARUH\_PERNYATAAN\_ATIUR\_RAHMAN\_SAARC\_I.pdf, [↑](#footnote-ref-17)
18. Robert Jackson dan Georg Sorensen. Pengantar Studi Hubungan Internasional. Hal.231. [↑](#footnote-ref-18)
19. Ibid, 234 [↑](#footnote-ref-19)
20. Ibid, 242 [↑](#footnote-ref-20)
21. Nuraeni, S., Silvya, D., Sudirman, A., & Adinugraha, E. (2010). *Regionalisme dalam studi hubungan internasional*. Pustaka Pelajar.. Hal 53 [↑](#footnote-ref-21)
22. Ibid [↑](#footnote-ref-22)
23. Bab II “Teori Integrasi”, dalam <http://repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/29301/3/Chapter%20II.pdf>, [↑](#footnote-ref-23)
24. Sholeh, “Persiapan Indonesia Dalam Menghadapi Aec

    (*Asean Economic Community*) 2015”, eJournal Ilmu Hubungan Internasional, 2013, 1 (2): 509-522

    ISSN 0000-0000, dalam ejournal.hi.fisip-unmul.org, hal 2 [↑](#footnote-ref-24)
25. Umar Suryadi Bakry. Op.Cit., Hal 174. [↑](#footnote-ref-25)
26. Ibid., Hal 175. [↑](#footnote-ref-26)
27. Apriliani [↑](#footnote-ref-27)
28. “Piagam ASEAN”, Pasal 1 ayat 5 dalam <http://www.asean.org/storage/images/archive/AC-Indonesia.pdf>, [↑](#footnote-ref-28)
29. S. Adhitya. “*PERDAGANGAN BEBAS SEKTOR JASA DALAM MASYARAKAT EKONOMI ASEAN”* Dalam <http://repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/52343/3/Chapter%20II.pdf>, [↑](#footnote-ref-29)
30. Tri Siwi Nugrahani dan Dian Hiftiani Tarioko “*Perbedaan Pertumbuhan Ekonomi, Investasi Domestik Dan Ekspor Antara Sebelum Dan Sesudah Krisis*” akmenika UPY, volume 8, 2011 [↑](#footnote-ref-30)
31. BPS. “PENGERTIAN PENDAPATAN NASIONAL”, Dalam <https://www.bps.go.id/Subjek/view/id/11>, [↑](#footnote-ref-31)
32. Lista Kuspriatni, “Hukum Dagang” , dalam http://lista.staff.gunadarma.ac.id/Downloads/files/19546/Hukum+Dagang.pdf [↑](#footnote-ref-32)
33. Asdi Aulia Perdagangan Internasional dan

    Restrukturisasi Industri TPT di Indonesia, *Jurnal Administrasi Bisnis (2008), Vol.4, No.1: hal. 46–54, (ISSN:0216–1249),* 46 [↑](#footnote-ref-33)
34. OECD, Op.cit., hal 7 [↑](#footnote-ref-34)
35. Ibid. [↑](#footnote-ref-35)
36. “ Ekonomi RI Peringkat Tiga Besar di G20” dalam <https://www.jurnalasia.com/bisnis/info-bank/ekonomi-ri-peringkat-tiga-besar-di-g20/>, diakses pada Oktober 2016 [↑](#footnote-ref-36)
37. Ibid. [↑](#footnote-ref-37)
38. Buletin Bank Indonesia: Gerai Info hal 1. Dalam <http://www.bi.go.id/id/publikasi/gerai-info/Documents/98a3d9fff8654952a5b8f19e8d00e1d1GIed29_agt2012191020121000LOW.pdf>, [↑](#footnote-ref-38)